

BAB IV

SIMPULAN

1. Kelembagaan PBJP Indonesia berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Prpres No. 12 tahun 2021 disebut dengan UKPBJ yang mana menjadi salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah untuk lebih dikembangkan karena UKPBJ merupakan pusat yang mengelola dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. Struktur UKPBJ berbentuk struktural dibantu dengan Pokja Pemilihan serta Pejabat Fungsional dalam hal pelaksanaan pengadaan.
2. Kelembagaan PBJP di negara maju dan berkembang lainnya memiliki karakteristik yang cukup unik dan beragam. Kelembagaan PBJP China dibedakan antara pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan publik dan departemen pemerintahan. Di Amerika, kelembagaan PBJP-nya menggandeng pihak-pihak diluar pemerintahan sebagai bagian dari tim pengadaan. Di Inggris, kelembagaan PBJP-nya dapat berupa badan hukum ataupun tidak (lebih fleksibel). Kemudian untuk Nigeria, kelembagaan PBJP-nya di setiap kementerian atau parasatatal disebut dengan Divisi Tender dengan bentuk struktural, yang mana dalam Divisi Tender ini dibantu oleh Komite Evaluasi Teknikal Tender.

3. Perbandingan mendasar dari kelembagaan PBJP Indonesia dengan Cina terletak pada jenis kelembagaan PBJP-nya. Di Cina, kelembagaan PBJP-nya dibedakan antara departemen pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan publik, sementara di Indonesia yaitu sama disetiap level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di Amerika, kelembagaan PBJP-nya unik dari segi anggota tim yaitu terdiri dari tim dari pemerintah maupun dari luar pemerintah, sementara di Indonesia UKPBJ tentunya hanya diisi oleh pejabat pemerintah. Di Inggris, kelembagaan PBJP-nya memiliki bentuk yang dapat berupa badan hukum maupun tidak, lebih fleksibel dari kelembagaan PBJP Indonesia dan negara lain. Lain hal dengan kelembagaan PBJP di Nigeria. Kelembagaan PBJP Nigeria kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Indonesia.